



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI IV DPR RI**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : V (lima)
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Sekjen KKP, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Dirjen PDSP KKP, Ka. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP.
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 25 Mei 2022
Waktu : Pukul 10.40 s.d. 12.50 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI
Gedung Nusantara I (KK-IV)
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDI P)
Acara : Membahas:
1. Realisasi PNBP sektor kelautan dan perikanan;
2. Persiapan stok benih ikan di UPT untuk pokdakan; dan
3. Ekspor dan impor komoditas kelautan perikanan.
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota Komisi IV DPR RI:
31 dari 52 Anggota dengan rincian :
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10 dari 11 orang Anggota
1) Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
2) Riezky Aprilia, S.H., M.H.
3) H. Sunarna, S.E., M.Hum.
4) Ono Surono, S.T.
5) Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
6) Drs. I Made Urip, M.Si. - Virtual
7) Dr. H. Sutrisno, S.E., M.B.A. - Virtual
8) Vita Ervina, S.E., M.B.A.
9) Maria Lestari, S.Pd. - Virtual
10) Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.
2. Fraksi Partai Golongan Karya
5 dari 7 orang Anggota

- 1) H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
 - 2) H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
 - 3) Firman Soebayo, S.E., M.H. - Virtual
 - 4) Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.
 - 5) Alien Mus - Virtual
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
5 dari 7 orang Anggota
- 1) G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
 - 2) Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
 - 3) Ir. Endro Hermono, M.B.A.
 - 4) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.
 - 5) Dr. Azikin Solthan, M.Si. - Virtual
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
2 dari 6 orang Anggota
- 1) Ir. Abdullah Tuasikal - Virtual
 - 2) Yessy Melania, S.E. - Virtual
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3 dari 6 orang Anggota
- 1) Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
 - 2) Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
 - 3) Edward Tanur, S.H.
6. Fraksi Partai Demokrat
3 dari 5 orang Anggota
- 1) Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
 - 2) Muhammad Dhevy Bijak Pawindu
 - 3) Bambang Purwanto, S.ST., M.H. - Virtual
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3 dari 5 orang Anggota
- 1) drh. H. Slamet
 - 2) Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M. - Virtual
 - 3) Prof. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional
0 dari 3 orang Anggota
-
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
0 dari 2 orang Anggota
-
- B. Pemerintah
1. Sekjen KKP RI (Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum);
 2. Dirjen Penguatan Daya Saing KKP RI

- (Ir. Artati Widiarti, M.A.);
3. Plt. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP RI (Ir. Hari Maryadi, M.Si.);
 4. Kuasa Dirjen Perikanan Budidaya (Gemi Triastutik).

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bapak/Ibu kita semua yang terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi IV, Yang terhormat Sekretaris Jenderal serta jajarannya.

Di sini juga ada sepucuk surat dari Dirjen Budidaya yang bersangkutan tidak bisa hadir hari ini. Kemudian saya tidak melihat yang mewakili atau surat dari Dirjen Tangkap. Siapa yang mewakili?

SEKJEN KKP RI:

Izin melaporkan, Pak Ketua.

Dirjen Tangkap di dalam undangan tidak ada tapi...

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oh, enggak ada ya?

SEKJEN KKP RI:

Tidak ada di dalam undangan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kok Sekretariat begini? Ini kan hanya masalah, hei, ini kan masalah PNBP loh, harusnya kan Dirjen Tangkap diundang. Ini bagaimana sih kalian? Mana Thomy, Thomy mana Thomy? Bagaimana ini? Ini kan PNBP sebagian besar adalah hasil dari Dirjen Tangkap loh.

SEKJEN KKP RI:

Izin melaporkan, Pak Ketua.

Yang kami tapi kami hadirkan juga Sesditnya, kebetulan Dirjenya juga sama-sama Pak Dirjen.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Eenggak apa-apa. Maksudnya begini Pak Sekjen, itu kelalaian kami di Sekretariat, karena kan ini kan membahas masalah PNBP ya, penghasilan besar PNBP adalah dari Dirjen Tangkap, itu ingin kami ketahui. Saya minta tolong lain kali jangan ada kejadian seperti ini lagi.

Mengawali rapat hari ini, pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat dalam keadaan badan sehat walafiat.

Sesuai dengan Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Bamus tanggal 24 Maret 2022 dan keputusan rapat internal tanggal 18 Mei 2022, pada hari ini, Rabu, tanggal 25 Mei, Komisi IV menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen, Dirjen Budidaya, Dirjen Penguatan Daya Saing, serta Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas: realisasi PNBP sektor kelautan dan perikanan; kedua, persiapan stok benih ikan di UPT dan pokdakan; dan ekspor dan impor komoditas kelautan perikanan.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sesuai dengan Tatib Pasal 276 ayat (1), rapat dengar pendapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.40 WIB)**

Rapat hari ini kita mulai pada pukul 10.40 WIB dan akan diakhiri pada pukul 13.40 WIB. Apabila belum selesai, dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 Peraturan tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar ketua rapat;
2. Penjelasan para pejabat Eselon 1;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban para pejabat Eselon 1;
5. Kesimpulan rapat.

Apakah acara ini dapat disetujui?

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Komisi IV melihat Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2022 memiliki beberapa target program unggulan yang ingin dicapai, di antaranya

adalah: Satu, akan meningkatkan PNBP yang berasal dari sumber daya alam kelautan dan perikanan. Maka, tadi saya tanyakan kenapa *kok* Dirjennya enggak diundang, ini kesalahan kami dari Sekretariat. Kedua, akan meningkatkan ekspor yang berasal dari pengembangan perikanan budidaya ikan yang terintegrasi dalam satu manajemen kawasan terpadu yang ramah lingkungan. Tiga, akan meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan dan masyarakat dengan membangun kampung-kampung perikanan yang membudidaya ikan air tawar, payau, air laut yang bernilai ekonomis tinggi.

Dalam uraian di atas, Komisi IV mengapresiasi capaian PNBP KKP Tahun 2021 sebesar 995,74 miliar yang akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya khususnya tercapai PNBP KKP per Mei 2022 telah mencapai 657 miliar dari target 1,9 triliun atau sudah tercapai 34,56%. Selanjutnya, Komisi IV juga mendukung target PNBP KKP hingga tahun 2024 sebesar 12 triliun, tapi apakah mungkin karena waktunya tinggal dua tahun lagi. Namun, perlu diingat bahwa target tersebut tidaklah mudah diraih jika tidak memiliki komitmen serta akselerasi strategi yang matang, mengingat izin kapal per Mei 2022 baru mencapai sebanyak 6.321 kapal dari total alokasi kapal yang ada sebanyak 10.280 atau setara dengan 1.225.520 gross ton. Untuk itu KKP perlu memastikan bahwa proses perizinan kapal bagi pelaku usaha perikanan dapat dipercepat untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun terkait dengan ekspor komoditas ikan ke beberapa negara tujuan, perlu diperbaiki dan diantisipasi, mengingat pada tahun 2021 terdapat hambatan *even* misalnya ke negara Cina karena adanya temuan kontaminasi Covid-19 pada kemasan dan produk perikanan Indonesia, sehingga ditolak masuk. Selain itu, adanya hambatan Indonesia belum mempunyai kesepakatan kerja sama dengan negara, antara lain misalnya: Afrika, Timur Tengah, Rusia. Amerika Latin hingga akses ke pasar tersebut belum terbuka secara luas.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan dan masyarakat melalui pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya, Komisi IV menyarankan perlu adanya dukungan pasokan benih ikan yang unggul dan berkualitas dari UPT Balai Budidaya Ikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, terkait ukuran benih ikan dan anggaran distribusi dirasa masih perlu diperbaiki dan dialokasikan agar bantuan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

Demikian pernyataan kami sampaikan. Sebelum Bapak Sekjen, tolong tampilkan ini mohon maaf para Anggota Bapak/Ibu yang saya hormati, kami ingin mengundang kami ada Festival Kopi tanggal 27, 28, 29 di Jakarta *Convention Center* atau di Senayan di halaman parkirnya. Pameran kopi ini diikuti oleh 24 provinsi se-Indonesia. Ngopi gratis dan cukup banyak para artis yang akan hadir di sana waktu pembukaan maupun penutupan, naikin ke atas lagi. Jadi Bapak/Ibu kalau datang ke sana yang sudah pasti minum kopi gratis, kalau makan gratis tapi pulangnya baru bayar.

Lanjutin ke atas, mana tadi. Ke atasin lagi sedikit.

Ini termasuk kita akan bikin museum kopi karena festival ini cukup ramai dan kami dari Fraksi PDI Perjuangan tidak menggunakan atribut partai. Jadi mohon Pak Sekjen, stafnya atau karyawannya di Kementerian 27, 28, 29 hadirilah, termasuk juga teman-teman Komisi IV Anggota untuk Anggota dan Eselon 1 sudah disiapkan *booth* VVIP untuk coba kopi dari 24 provinsi. Terima kasih.

Sebelumnya juga saya ingin mengingatkan Pak Sekjen. Terjadi anggaran yang sia-sia tahun 2019 dibangun apa namanya Andi, yang tampilan Morotai, yang Morotai. Ini Pak Sekjen, dari awal saya menolak pembangunan Minamahar ini. Sampai sekarang bangunannya ada, mangkrak, pemilihan lokasi pun tidak tepat, ada dua dibangun anggarannya kurang lebih *multi years* 522 miliar. Ini bukan zamannya Pak Edhy, bukan zamannya menteri sekarang, tetapi dengan mangkraknya ini terjadi kerugian negara yang cukup besar. Yang pertama, dulu waktu pembangunan saya pertanyakan, ini untuk apa, "Oh ini untuk riset dan lain-lain", tapi *kok* dipasangnya di Morotai, yang satu di Pangandaran. Nah, ini kan bukan hanya untuk kalangan tertentu tetapi semua baik pelajar, mahasiswa, masyarakat dan lain-lain ini nyatanya ini sekarang mangkrak ini hanya bangunannya *tok* enggak ada isinya. Saya dapat info juga yang di Pangandaran baru sekian persen selesai tapi katanya sudah ada akuariumnya, akuariumnya pun ikannya enggak jelas ikan apa. Ini untuk menjadi perhatian, saya khawatir ini ada temuan dari BPK karena ini anggarannya 2019 ya.

Selanjutnya saya persilakan Sekjen untuk menjelaskan.

Terima kasih.

SEKJEN KKP RI:

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, Bapak Ibu Anggota Komisi IV DPR RI.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat sehingga kita dapat hadir di acara rapat hari ini. Pada kesempatan bahagia ini perkenankan kami keluarga besar Kementerian Kelautan Perikanan mengucapkan, "Selamat Hari Raya Idul Fitri" bagi yang merayakannya. Kami mohon maaf lahir batin, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menerima amal ibadah puasa kita dan menjadikan kita kembali dalam keadaan suci serta termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Dalam kesempatan rapat ini perkenankan kami menyampaikan bahan paparan dengan agenda pembahasan yang pertama adalah realisasi PNBP sektor kelautan dan perikanan. Yang kedua, persiapan stok benih ikan di UPT untuk Pokdakan dan yang terakhir ekspor dan impor komoditas kelautan dan perikanan. Berkenaan dengan realisasi PNBP KKP sampai dengan 20 Mei 2022 telah mencapai Rp651.900.000.000,- yang terdiri dari penerimaan sumber daya alam sebesar 504 miliar 500, ulangi Rp56.000.000,-. Untuk penerimaan non sumber daya alam sebesar 146,20 miliar dan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 6,33 miliar.

Realisasi PNBP tahun 2022 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. PNBP KKP pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 1,9 triliun dengan realisasi per 23 Mei sebesar 657 miliar atau mencapai 34,56%. Kontribusi realisasi terbesar bersumber dari penerimaan sumber daya alam, yaitu sebesar 504 miliar atau mencapai 76,79% dari total realisasi PNBP KKP. Pendapatan sumber daya alam perikanan ini berasal dari pendapatan pungutan hasil perikanan sebesar 469 miliar, pendapatan pungutan pengusaha perikanan tangkap sebesar 35,48 miliar dan pendapatan pungutan pengusaha perikanan budidaya sebesar Rp50.000.000,-.

Dalam perencanaan PNBP perikanan tangkap ke depan, KKP akan mengoptimalkan PNBP melalui penangkapan ikan terukur yang apabila nilai produksi perikanan tangkap dikonversi ke nilai PNBP dapat mencapai 12 triliun. Sejalan dengan semangat pencapaian tersebut, dalam proses pengusulan APBN setiap tahunnya dilakukan penelahan ulang target PNBP antara KKP, Kementerian Keuangan, dan Banggar didasarkan pada asumsi yang berkembang di mana target PNBP KKP tahun 2022 ditetapkan sebesar 1,63 triliun.

Selanjutnya, upaya pencapaian target PNBP perikanan tangkap akan ditempuh melalui yang pertama penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur di setiap wilayah pengelolaan perikanan untuk mengoptimalkan keseimbangan antara ekologi, ekonomi, dan sosial dalam pengelolaan sumber daya perikanan tangkap. Upaya yang kedua, kebijakan penangkapan ikan terukur dari sisi penerimaan negara dilakukan berdasarkan amanat PP 85 Tahun 2021. Yang ketiga, implementasi penangkapan ikan terukur untuk peningkatan PNBP akan didukung dengan penyiapan regulasi meliputi: Kepmen KP Nomor 97 tentang Harga Patokan Ikan, Kepmen KP Nomor 98 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan, Kepmen KP 19 Tahun 2022 tentang Potensi Sumber Daya Ikan. Lalu Rancangan Permen KP tentang Kontrak Kerja Sama, Rancangan PP tentang Penangkapan Ikan Terukur, yang keduanya sedang diproses dan harmonisasi. Penyiapan pelabuhan pendaratan meliputi: timbangan *online*, CCTV, perlengkapan troli, perlengkapan keranjang dan pagar pengawas pembongkaran. Yang terakhir, penyiapan SDM pendukung meliputi syahbandar, petugas kesyahbandaran, petugas pengolahan data dan verifikator pengolahan data, petugas inspeksi mutu dan observer.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Terkait dengan ketersediaan stok benih ikan dan calon ikan untuk bantuan ke-pokdakan, kami laporkan proses bantuan benih sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 total realisasi bantuan benih ikan sebanyak 89,9 juta ekor atau 59% dari total target bantuan. Sedangkan untuk calon induk ikan untuk bantuan ke pokdakan, total realisasi bantuan sebanyak 62.000 atau 60% dari total target bantuan. KKP berkomitmen untuk memenuhi sisa target benih sebesar 20,7 juta ekor dan calon induk ikan 54.000 ekor sampai Desember 2022 dengan terus memproduksi ketersediaan stok benih dan calon induk ikan di UPT DJP, di UPT dan tetap menjaga kualitasnya.

Selanjutnya, terkait dengan ekspor dan impor komoditas kelautan dan perikanan, dapat kami laporkan pada periode Januari sampai Maret 2022 atau triwulan I, nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai 1,53 miliar dolar atau 21,95 triliun atau naik 21,63% dibanding periode yang sama di tahun yang lalu. Nilai impor mencapai 139,89 juta dolar Amerika atau sekitar 9,14% terhadap nilai ekspor, sehingga mengukuhkan Indonesia sebagai negara net eksportir produk perikanan. Sedangkan neraca perdagangan produk perikanan mengalami surplus sebesar 1,39 miliar atau 19,95 triliun atau naik 21,79%.

Komoditas ekspor utama meliputi: udang yaitu 621,9 juta dolar atau 40,64% terhadap nilai ekspor total, meningkat 18% dibandingkan periode sebelumnya. Selanjutnya tuna, cakalang, tongkol sebesar 189 juta dolar, meningkat 12%. Rajungan kepiting sebesar 170 juta dolar meningkat 60,70%. Rumput laut sebesar 114 juta dolar, meningkat 7,5% dibanding periode sebelumnya. Untuk negara tujuan ekspor tetap masih di yang utama adalah Amerika dengan nilai ekspor sebesar 727 juta dolar atau meningkat 29,5% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Berikutnya secara berturut-turut adalah Tiongkok, Jepang, ASEAN, dan yang terakhir ada adalah Uni Eropa ada di 27 negara.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Terkait dengan komoditas impor utama produk perikanan periode di Triwulan I Tahun 2022 antara lain: tepung ikan sebesar 24 juta dolar, makarel beku 22,8 juta dolar, untuk cod 16,3 juta dolar, rajungan beku 15,5 juta dolar dan salmon terus sebesar 13 juta dolar. Impor produk perikanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberlanjutan usaha sektor perikanan yang dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan antara lain untuk kebutuhan bahan baku unit. Pengolahan ikan untuk diolah dan diekspor kembali memenuhi kebutuhan produk perikanan untuk mendukung sektor pariwisata dan keberlanjutan usaha pengolahan tradisional dan memenuhi kebutuhan bahan baku dalam rangka pengembangan industri perikanan budidaya dan tangkap.

Upaya yang KKP lakukan untuk meningkatkan ekspor perikanan pasca pandemi 19 antara lain, upayanya yang pertama adalah meningkatkan produksi ikan melalui implementasi penangkapan ikan terukur. Yang kedua, penumbuhan dan pembinaan eksportir serta pembinaan UMKM dalam meningkatkan mutu produk kualitas ekspor melalui pemenuhan persyaratan

negara tujuan. Yang ketiga, penguatan pemasaran dan branding produk perikanan Indonesia melalui profiling pasar ekspor dan intelijen pasar berpartisipasi dalam promosi produk perikanan bertaraf Internasional, pemanfaatan digital marketing, melakukan sinergi dan kolaborasi dengan KL perwakilan Indonesia, diaspora serta melakukan diplomasi perdagangan penyelesaian hambatan ekspor.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Demikian yang dapat kami sampaikan dalam rapat dengar pendapat kali ini. Kami mohon dukungan Komisi IV. Seluruh saran, masukan, rekomendasi akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan pembangunan kelautan dan perikanan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih atas penjelasannya yang tersampaikan.

Selanjutnya kami persilakan Anggota Komisi IV untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, tetapi tadi ada diskusi di ruang makan perihal pengadaan perahu itu. Nanti teman-teman jangan hanya ngomong di ruang meja makan saja, sampaikan di sini kendalanya apa, bagaimana solusinya apa.

Silakan, Bu Anggi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik.

Terima kasih.

Pak Ketua, Pak Sekjen, dan semua jajarannya mohon maaf lahir batin dari hati yang paling dalam untuk dimaafkan.

Bapak, Ibu sekalian.

Silakan kalau mau memberikan respons atau tanggapan apapun terutama untuk catatan peningkatan PNPB bukan pajak sering keliru itu BNPB ya kebalik sering kebalik dan ini berarti kalau lihat dari catatan Pak Sekjen dari tadi paparan Pak Sekjen, Uni Eropa kemarin kita sempat diskusikan Uni Eropa sempat di-*banned* ya Bu Hartati ingat kan? Ekspor apa ekspor kita ke Uni Eropa. Beberapa setahun, seingat saya setahun yang lalu kita rapat dan kita diskusi ya waktu itu diskusi agak panjang tentang bagaimana kita mampu untuk menembus ikan-ikan kita menembus Uni

Eropa. Kalau dari catatan itu berarti sudah enggak ada *banned*. Dijawab dong tolong.

DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Baik.

Bu Pimpinan yang kami hormati, Ibu, dan Bapak sekalian.

Assalamu'aikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terkait dengan ekspor ke Eropa sebetulnya tidak di-*banned* Ibu, tetapi ada moratorium penambahan *approval* number baru ya ini sudah sekian lama begitu. Jadi ini yang masih dalam proses.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Sampai sekarang belum berarti, masih?

DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Belum bisa menambah eksportir baru ke sana. Jadi ya kalau yang lama yang sudah punya nomor registrasi tetap bisa melakukan ekspor ke sana, hanya belum bisa menambah eksportir baru.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik dan itu ada peningkatan tetapi eksportirnya tetap sama, tetapi ada peningkatan volume yang diekspor

DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Betul, volume dan nilai.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Dari yang lama?

DIRJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Dari yang lama.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Oke. Baik.

Terima kasih, Bu Dirjen.

Bu Endang, silakan.

F-P. GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Terima kasih, Bu Ketua.

Bismillahirrohmanirohim.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Dan masih Bulan Syawal tidak lupa kami juga mengucapkan, "Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon dimaafkan lahir dan batin".

Yang kami hormati Ibu Ketua, beserta Anggota Komisi IV DPR RI dan Pak Sekjen beserta jajarannya yang saya banggakan.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah tentunya Yang Maha Esa, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan masih sehat walafiat dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik.

Sehubungan dengan pembahasan materi tadi, kami dari Fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa catatan dan juga tanggapan dan juga tentunya usulan-usulan sebagai berikut:

Yang pertama, kami dari Fraksi Partai Gerindra sangat mengapresiasi realisasi dari PNBK kita tahun 2022 yang mengalami peningkatan. Namun, apabila dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya yang terjadi peningkatan tadi, ternyata realisasi PNBK kita ini juga belum mencapai target yang kita inginkan. Nah, untuk itu Fraksi Partai Gerindra tidak sekedar mengejar target, tapi bagaimana hasil dari PNBK tadi bisa menyejahterakan nelayan-nelayan kita dan juga bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk program penanggulangan pasca Covid-19 ini karena yang kita ketahui nelayan-nelayan kita masih mengalami kesulitan.

Yang kedua, pakaian PNBK Tahun 2022 yang berhasil tersebut, tentu saja kami ingin penjelasan karena di antara Direktorat Jenderal terkait, yaitu antara Eselon I tidak semuanya. Nah, untuk itu kami inginkan ada keterangan kenapa dari target yang sebesar 49 miliar 545 ribu 720, 720 ribu itu tidak mencapai target yang kita inginkan. Ini khususnya di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pak. Kemudian di Sekretariat Jenderal baru mencapai 14,74% dari target, juga di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan baru mencapai 18,76%. Nah, demikian juga Direktorat Jenderal

lainnya dan Badan Karantina bervariasi dari 30,47 sampai dengan 49,81%. Nah, untuk itu kami ingin mendapatkan keterangan yang akurat mengenai hal tersebut. Kemudian di Inspektorat Jenderal yang tidak memiliki target, tapi telah memberi realisasi PNPB sembilan miliar, tujuh ratus empat puluh tiga, tiga ratus tujuh puluh empat. Nah ini juga suatu keistimewaan.

Yang ketiga, Fraksi Partai Gerindra meminta perlu adanya *parent stock* Pak atau indukan di Unit Pembenihan Rakyat yang merata di sentra-sentra budidaya ikan terutama jenis-jenis *herbivore fish* seperti: gurame, nila, bandeng dan tombro dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pakan dari impor.

Yang keempat, diharapkan adanya *Mutual Recognition Arrangement* atau MRA pengaturan internasional yang didasarkan pada suatu perjanjian antarnegara yang tadi seperti dikemukakan oleh Ibu Wakil Ketua bahwa ekspor kita ke Eropa perlu ditindaklanjuti sehingga *go international* kita melalui pembinaan yang terukur bisa diantisipasi dari sekarang. Terkait hal tersebut, Fraksi Partai Gerindra meminta perlu adanya keterbukaan informasi, yaitu dengan sosialisasi-sosialisasi untuk mengetahui isi dari MRA tersebut sehingga potensi ekspor dapat diketahui oleh UKM dan Kelembagaan Pokdakan bersama dengan unit pengolahan ikan di daerah-daerah.

Nah, kemudian yang kelima kebijakan ekspor benih lobster dihentikan. Namun, sesuai dengan ketentuan yang, yaitu dengan sesuai ketentuan yang ada Nomor 17/2021 tentang keberlanjutan dalam benih lobster tapi sayangnya di lapangan masih terjadi penyelundupan ekspor benih lobster ke luar negeri seperti halnya di Lombok, Pandeglang, Banyuwangi, Jambi, Palembang, Banten, Cirebon dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kami dari Fraksi Partai Gerindra memohon agar ada pengawasan yang lebih baik dan tindakan tegas.

Kemudian yang keenam terkait penerapan program penangkapan ikan yang secara terukur. Nah, ini mohon dijelaskan memastikan dengan benar regulasinya supaya program ini benar-benar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan pada umumnya.

Kemudian berikutnya adalah meminta KKP untuk terus meningkatkan komoditas ekspor kelautan dan perikanan dengan menjaga kualitasnya Pak dan mutu serta meningkatkan kinerja Badan Karantina Ikan bila perlu ada sosialisasi dari Badan Karantina sehingga masyarakat nelayan kita di daerah mengetahui persis bagaimana regulasi tentang ekspor kita.

Yang kedelapan, Fraksi Partai Gerindra meminta KKP untuk memperkuat perlindungan nelayan tradisional karena sering berhadapan dengan berbagai praktik perampasan ruang hidup dan ruang kelola dalam bentuk proyek reklamasi pesisir dan pertambangan laut, kemudian mengatasmakan industri pariwisata, pembangunan *smelter* dan lain sebagainya yang masih terjadi di beberapa wilayah. Nah, untuk itu kami mempertanyakan bagaimana tentang regulasinya.

Dan yang berikutnya adalah mekanisme sistem kontrak yang tertuang dalam rancangan kebijakan penangkapan terukur yang berasal dari kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan sistem kontrak. Nah, ini perlu ada sosialisasi yang jelas.

Nah, dengan demikian maka Fraksi Partai Gerindra meminta juga Dirjen Perikanan dan Budidaya ini, Pak untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap mekanisme pengadaan dan kualitas sarana bioflok dengan adanya kelainan iklim yang melanda di beberapa daerah ternyata banyak sekali alat-alat untuk di bioflok ini kabur kena angin Pak di beberapa daerah. Nah, tentu saja hal ini kalau kita bandingkan dengan pengadaan di tahun 2021 tahun sebelumnya ternyata lebih kuat. Nah, jadi berarti ada penurunan kualitas untuk bioflok.

Demikian Ibu dan Bapak sekalian. Mohon Pak Sekjen dan beserta jajarannya bisa memberikan masukan dan evaluasi tentang kegiatan-kegiatan kami yang ada di daerah.

Demikian.

Terima kasih.

*Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Hanan selanjutnya.

F-P. GOLKAR (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Terima kasih, Pimpinan.

Rekan-rekan Anggota yang terhormat,
Pak Sekjen beserta jajarannya yang saya hormati.

Pertama saya ingin mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya terkait dengan bagaimana kita kedepan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh Kementerian Kelautan Perikanan untuk bagaimana pendapatan dari sumber daya alam kita terutama perikanan ini bisa menjadi tumpuan untuk sumber pendapatan negara kita. Di-hand out ini sudah disampaikan terkait dengan penangkapan ikan terukur Pak ya, penangkapan ikan terukur ini implementasinya akan didukung yang sudah disebutkan penyiapan regulasi, penyiapan pelabuhan, penyiapan SDM, dan sebagainya. Ini pertanyaan saya ini kapan, Pak ini kita akan apa mulai begitu Pak ya untuk penerapan penangkapan ikan terukur ini?

Terkait dengan sarana prasarana, Pak tentunya pelabuhan pendaratan ikan itu akan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak walaupun kebijakan penangkapan ikan terukur ini akan diterapkan. Nah, untuk itu kami mohon informasi pelabuhan-pelabuhan yang sudah ada yang *existing* seperti apa, yang *existing* ini juga ada yang sudah dibangun beberapa tahun yang lalu tetapi tidak operasional. Kita sudah meninjau beberapa daerah. Nah, ini kami ingin minta informasi itu bagaimana mengoptimalkan itu Pak kedepannya. Begitu juga dukungan APBN kedepan tentunya harus lebih dititikberatkan kepada bagaimana implementasi penangkapan ikan terukur ini dapat segera diterapkan.

Terkait dengan dukungan regulasi, tentunya kami berharap dalam waktu secepat-cepatnya ini ada rancangan-rancangan peraturan pemerintah, rancangan-rancangan Permen yang sedang dalam proses harmonisasi maupun penyusunan, ini tentunya perlu percepatan, Pak ya kedepan ya. Titik tekan kami adalah terkait dengan dukungan APBN mulai 2023 dan seterusnya terkait untuk program kebijakan penangkapan ikan terukur ini untuk mendapat perhatian lebih besar lagi.

Kemudian terkait dengan stok benih ikan untuk kita maklumi, benih ikan ini di lapangan diproduksi baik oleh Balai Benih kita sendiri maupun oleh penangkar-penangkar benih rakyat ya. Nah, ini mohon informasi Pak, kalau dilihat ada kekurangan benih dan sebagainya setiap mungkin lokus ya berdasarkan lokus kemudian potensi pengembangan misalnya saja ikan, ikan mas itu di Jawa Barat itu ada berapa kemampuan produksi benih baik dari Balai Benih kita maupun dari rakyat. Ini saya kira perlu mendapat perhatian.

Kemudian juga kaitan dengan program yang menjadi unggulan kita yang didukung oleh teman-teman dari legislatif ini, Pak terkait dengan bioflok. Saya kira kedepannya untuk mendapat perhatian lebih banyak lagi. Terkait dengan bantuan-bantuan untuk masyarakat, Pak. Contoh tadi sempat kita diskusi terkait dengan pengadaan-pengadaan kapal yang kita lihat di lapangan ternyata ya kalau dikatakan tidak bermanfaat ya bermanfaat tapi kurang optimal begitu, lebih baik diubah ke program-program yang lain yang lebih bermanfaat, misalnya saja bioflok ini kita jadikan program unggulan kita kedepan.

Saya kira ini, Pak dari saya.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Hanan.

Ibu Nuraini, Silakan.

Oh, gitu ya. Silakan

F-P. DEMOKRAT (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):

Oh, saya?

Terima kasih, Pimpinan.

Ibu Pimpinan dan Bapak-bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV yang saya hormati dan yang saya banggakan. Kemudian dari Kementerian KKP, Sekjen dan seluruh jajaran yang hadir yang saya hormati.

Seperti yang disampaikan pendahulu tadi bahwa kami pun dari Fraksi Partai Demokrat memberikan tanggapan serta pertanyaan kepada Kementerian KKP. Yang pertama, terkait dengan ekspor sektor perikanan harus didorong kearah yang barang olahan agar jangan lagi tergantung kepada produk mentah. Masyarakat terutama di kawasan pesisir biasanya mendapatkan manfaat yang ekonomi yang lebih jauh lebih besar ketimbang sekedar mengekspor barang mentah ke pasar-pasar luar negeri. Oleh karena itu, kami berharap kepada KKP diharapkan dapat melakukan pelatihan pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat terkait agar bisa melengkapi dirinya dengan berbagai persyaratan yang diperlukan untuk ekspor.

Yang kedua, Fraksi Partai Demokrat mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kami berharap kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan demi terwujudnya laut yang sehat dan berkeadilan. Lebih dari itu, kami juga berharap besar dari nilai PNBP bidang perikanan kita dapat terserap dengan lebih maksimal jika kebijakan ini berjalan sistematis menurut perhitungan, maka nilai PNBP pada tahun 2024 bisa mencapai Rp14,55 triliun dengan potensi ikan tertangkap 5 juta ton.

Selanjutnya untuk keberhasilan kebijakan penangkapan ikan terukur sangat ditentukan kesiapan sistem informasi teknologi dan transformasi digital melalui satelit yang merekam dan melaporkan aktivitas penangkapan ikan secara *real time* dan *continue* disertai pengawasan dan penangkapan, penegakan hukum, sehingga kesalahan maupun manipulasi pendataan oleh para pemburu rente sejauh ini, yang menjadi pertanyaan kami seperti apa kesiapan infrastruktur dan teknologi guna mendukung kebijakan tersebut.

Selanjutnya, kami pun dari Fraksi Demokrat mendorong agar produk perikanan Indonesia di berbagai negara bisa menikmati tarif 0%. Sejak November 2021, tarif ekspor ke beberapa negara Eropa yaitu Islandia, Norwegia, Swiss dan beberapa negara lainnya. Namun demikian, tarif bea masuk produk perikanan kita di sebagian besar negara Eropa masih 15% sehingga ekspor produksi perikanan kita sulit bersaing. Sementara ekspor perikanan dari negara tetangga seperti: Filipina dan Vietnam tidak dikenakan

tarif di semua negara Eropa. Yang menjadi pertanyaan kami sampai saat ini sejauh mana upaya KKP dalam melakukan perjanjian perdagangan internasional guna menghapus tarif bea masuk di beberapa pasar produksi produk perikanan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Indonesia merupakan salah satu negara produsen udang terbesar di dunia. Total nilai ekspor udang sepanjang tahun 2021 sebesar 621,90 juta US Dollar atau 40,64% terhadap nilai ekspor total. Meskipun demikian hampir 65% ekspor baru tertuju ke pasar tradisional Amerika Serikat, sedangkan sisanya diekspor ke Jepang dan China. Besarnya proporsi ekspor udang Republik Indonesia ke Amerika bukanlah hal yang baik menurut ilmu pemasaran. Oleh karena itu, kami dari Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa Indonesia penting untuk melakukan perluasan pasar dengan menjajaki pasar baru agar tak bergantung kepada pasar tradisional Amerika.

Selanjutnya, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Hanan dengan bioflok ini, kami juga berharap bahwa masing-masing daerah ini mempunyai kebutuhan khusus. Jadi kalau untuk daerah kami kayaknya masih kurang-kurang pas lah kalau misalnya bioflok karena kami di wilayah Sulawesi Selatan III ini masih pesisir pantai, Pak yang masih membutuhkan betul-betul bantuan-bantuan kapal. Oleh karena itu, mohon pertimbangannya terkait dengan itu.

Mungkin itu saja Pimpinan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Wa'alaikumsalam.

Pak Sekjen dan Ibu Dirjen mungkin ya beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Dubes Uni Eropa. Dia mengatakan bahwa produk yang ada yang dari Indonesia karena saya kejar tentang ikan, kita minta sebesar-besarnya misalkan ikan kita banyak jadi sebesar-besarnya ke Uni Eropa dan mereka bilang kita enggak kena pajak sama sekali dan bahkan dia bilang 0%. Tadi menyambung dengan yang disampaikan dan menyambung dengan beberapa waktu kita pernah rapat itu. Ini saya minta konfirmasi juga karena dia sendiri juga enggak PD waktu itu karena dia bilang, "masa' sih saya bilang begitu, masa sih 0%, masa iya?" Sama Vietnam saya pertanyakan begitu tapi dia bilang, "oh mungkin..." dianggap saya punya informasi yang lain, makanya saya konfirmasi nanti mohon untuk dijawab untuk itu.

Pak Edward, silakan.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Baik.

Selamat siang untuk kita semua.

Mohon maaf lahir dan batin, kita sudah lewat Hari Raya, oh masih ya jadi pas begitu ya.

Ya, terima kasih banyak Pimpinan. Terima kasih banyak para Anggota Komisi IV Pak. Terima kasih banyak Dirjen KKP beserta jajarannya.

Jadi hari ini kita omong mengenai pendapatan negara non pajak. Ya, kalau kita lihat dari apa materi yang disodorkan ini memang ada kenaikan tapi kita berharap bahwa kenaikan ini ya signifikanlah, jangan asal naik-naik saja tapi naiknya enggak sampai maksimal. Kita usahakan supaya KKP ini bisa untuk tahun depan itu mendapat dana yang lebih besar sehingga bisa menggenjot pendapatan non pajak ini, tapi prestasi juga harus kita harapkan juga harus ada, sehingga *timing* dalam melakukan program-program ini kalau bisa secepatnya jangan tunda-tunda, cepat, sehingga kita bisa merebut pasar yang ada di luar negeri.

Dan kami juga mengharapkan tidak salah tahun lalu yang saya sering ngomong bahwa produk kelautan Indonesia ekspornya ke luar negeri harus melalui Vietnam. Kalau kita, kalau langsung kena pajaknya 22% tidak salah, kalau lewat Vietnam ya mungkin Vietnam kenakan kita 10% tapi Vietnam keluar gratis enggak kena pajak. Ini perlu diklarifikasi tadi Uni Emirat Arab sejauh yang Ibu Ketua bilang 0%. Jangan sampai dia asal ngomong saja, sementara kita ekspor dia kenakan pajak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Uni Eropa, Bapak.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Oh Uni Eropa bukan Uni Eropa eh bukan Uni Emirat *sorry*, maaf telinga juga, artinya semua ini terganggu ini. Jadi saya memberikan apresiasi kalau memang Uni Eropa memberikan satu dukungan terhadap Indonesia ini adalah peluang yang terbaik bagi kita. Memang kita tahu bahwa laut kita kaya akan sumber daya alam ikan ini, cuma harus kita proses yang betul-betul berkualitas. Jangan sampai kualitasnya menurun, kuantitas oke tapi kualitas juga tolong diperhatikan, sehingga sentra-sentra produksi ikan kita atau hasil laut ini betul-betul harus melalui tes mutu yang benar, karantina juga harus benar. Jangan sampai hanya semangat tes-tes saja tapi tidak sesuai dengan mutu yang dikeluarkan, sampai di negara tujuan dites, amburadul semua nanti. Jadi kita belajar untuk, untuk melakukan sesuatu tepat sasaran.

Dan juga mengenai tadi ngomong tentang kapal 5 GT itu, kita kan sudah ngomong ulang-ulang tapi Pak Zaini enggak ada kita mau ngomong sama siapa ini. Pak Zaini sudah bikin kontrak sama provinsi, jadi saya pikir ini kita untkit lagi masalah ini tidak akan selesai. Saya pikir ini sudah final karena kami juga sudah buat CPCL. Waktu itu kita minta ke Pak Zaini agar tahun depan itu kalau mau pengadaan kapal ini *ngomong* dong sama Anggota DPR

ini kan dana aspirasi juga. Jangan sampai sudah berbuat habis tapi pura-pura bingung lagi kita jadi penasaran juga ini. Jadi saya tidak salah kita sepakat tahun depan itu pengadaan kapal ketinting ya, kita sepakat ketinting eh bukan kapal, mesin ketinting sama pukut saja karena itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita di pesisir. Itu nelayan miskin terlalu banyak, sudah miskin lagi ya macam-macam lah kekurangannya. Jadi saya terima kasih banyak.

Mengenai benih, benih ini saya pikir kita sudah sepakat yang 2021 itu kan pengadaan benih 3,5 sampai 5,5 senti benihnya tapi karena banyak yang mati maka itu dinaikkan menjadi 5 sampai dengan 7 senti. Apa betul Pak Dirjen? 5 sampai 7 senti. Kalau seandainya ini Pak Aping enggak ada ini jadi kita, jadi kalau saya saya pikir kalau 5 sampai 7 senti mungkin kita 4 TP tidak ada jadi mungkin ketahanannya bisa lebih kuat. Supaya ini, ini pengalaman Pak itu yang bioflok itu dikontraknya 19.000 sekian benih setelah dewasa mau dipanen dihitung-hitung 10.000 lebih saja. Saya waduh ini jangan sampai menguap ini. Jadi tidak mati dia maksudnya yang bioflok itu ya mati kecil ya tapi kesalahannya adalah perhitungan pada waktu pen-*drop*-an benih itu jadi tidak sampai jadi ya kami orang bisnis ini ya itu namanya apa seni, seni mencari keuntungan lebih besar itu seni tapi jangan menipu. Seni boleh seni kan kasihan yang bioflok itu kasihan semua. Jangan sampai kamu sudah jual itu (suara tidak jelas) betul Pak ini setelah dihitung sekian dikasih ancer-ancer itu ya saya bilang sudahlah hanya Allah saja yang tahulah daripada kita bertengkar.

Jadi berikutnya kami minta supaya pen-*drop*-an benih itu jangan tengah malam. Tengah malam ini orang pada saat tidur dia enggak memberitahukan tiba-tiba kantong-kantong-kantong turun. Aduh ini memang masalah besar sekali masalah di lapangan ini sangat besar. Jadi kalau teorinya tidak salah, teori benar tapi praktiknya di lapangan ini ya kita sama-sama tahu lah. Kita tidak menuduh tapi kenyataannya demikian. Tolonglah apa ini pembudidaya petani-petani ikan ini supaya diperhatikanlah, kasihan orang sudah susah miskin lagi kita buat dia mati lagi. Bantulah dengan setulus hati dan seikhlas mungkin lah.

Dan juga mengenai yang terakhir, yaitu mengenai apa indukan. Indukan ini tolong kalau bisa dikasih indukan yang betul-betul sehat sehingga pada waktu pen-*drop*-an atau pada waktu setelah akan dibudidaya betul-betul dia menghasilkan. Jangan sampai dia mandul. mandul, mandul ini artinya enggak punya enggak bisa punya anak, enggak bisa punya itu yang kita pentingkan. Memang semua indukan betul, tapi saya tidak tahu teknik cara mengetesnya mandul dan tidaknya, kalau sapi gampang, manusia gampang tapi ikan ini enggak tahu caranya bagaimana. Jadi mohon supaya ini tolong diperhatikan.

Saya kira hanya dari saya cukup sekian.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Terima kasih, Pak Edward.
Kakak Ansi silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Terima kasih, Bu Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua.

Teman-teman Komisi IV yang saya hormati,
Pak Sekjen para Eselon 1 yang hadir mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hari ini.

Yang pertama, terkait dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terkait dengan aspirasi buat para pembudidaya ikan air tawar lebih khusus lagi program bioflok, beberapa teman melaporkan kami patut memberikan apresiasi, Pak karena proses pembangunan sudah berjalan dan sejauh ini tidak ada hal-hal yang perlu untuk dikawatirkan lebih jauh dan kita berharap semoga kerja-kerja terkait dengan perikanan budidaya bioflok ini, ini bisa terus terjalin dengan baik kedepan.

Yang kedua, terkait dengan PNBP yang menjadi tema utama diskusi kita pada hari ini, Pak. Terus terang, Pak saya mau menyimpulkan bahwa laut Indonesia ini super kaya raya Pak, tetapi sungguh belum mampu menyejahterakan rakyat Indonesia. Kalau kita baca realisasi PNBP hingga 23 Mei disebutkan angkanya itu sebesar 34,56% setara dengan 657,09 miliar dari target 1,9 triliun. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, betul Pak ada kenaikan, tetapi terus terang Pak kalau kita baca data ini lebih cermat lebih teliti kita lihat nilai tangkapan ikan dari perikanan tangkap tahun 2020 itu sebesar 224,8 triliun rupiah. Saya ulangi dari perikanan tangkap saja 224,8 triliun rupiah.

Kalau hari ini kita menargetkan 1,9 triliun itu berarti dari sektor perikanan tangkap saja Pak, PNBP kita yang kita mau targetkan itu tidak sampai 1%, Pak. Realisasi yang disebutkan 34,56% atau setara 657,09 miliar itu setara dengan 0,26% dari tangkapan tahun 2020 sebesar 224 triliun. Maka pertanyaan kami Pak, ini siapa yang paling banyak dapat untung? Saya jawab saja sendiri Pak, tidak mungkin negara ini dapat untung, tidak mungkin nelayan kecil tradisional dapat untung. Saya jawab lagi, 200 sekian triliun ini pasti untung besar didapatkan oleh korporasi perikanan, Pak. Kalau toh ada tenaga kerja yang kerja di korporasi paling anak buah kapal, Pak.

Lalu kembali lagi kami tanyakan ini laut ini sudah menyejahterakan rakyat Indonesia atau tidak? Belum, dan targetnya terlalu rendah Pak 1,9 T dari PNBP. Kalau kita relasikan kita korelasikan dengan kebijakan penangkapan terukur, Pak. Dari segi kebijakan fraksi kami, saya juga itu

sejak awal mempertanyakan soal ini Pak terutama dalam hal keberpihakan kepada nelayan kecil dan tradisional. Menurut saya ya Kementerian KKP ini harus memperlihatkan komitmen yang kuat keberpihakan dan pemberdayaan kepada *wong cilik* dan *wong cilik* di sektor kelautan itu adalah para nelayan kecil dan tradisional kita, Pak. Maka terus terang Pak ketika beberapa kali kita diskusi soal Lumbung Ikan Nasional Menteri KKP mengatakan tidak ada uang, masa' enggak ada uang, Pak. Dari sektor perikanan tangkap saja kita bisa hasilkan 224 triliun tapi kenapa target PNBP kita cuma 1 triliun, itu pun bukan dari perikanan tangkap, masih ada dari beberapa hal: badan layanan umum, dari non sumber daya alam, dari sumber daya alam. Nah, kami juga ingin mendapatkan gambaran lebih konkret Pak PNBP dari per Eselon 1 KKP ini seperti apa, Pak.

Beberapa waktu lalu ketika Pak Trenggono pertama kali dilantik sebagai menteri, beliau menargetkan PNBP sampai 12 triliun. Pada saat itu saya suka waktu saya dengar saya bilang: "wah ini oke ini". Selama ini cuma 2 triliun sementara tangkapan kita saja 200 sekian triliun, Pak. Berarti ada tata kelola yang salah disini, Pak dan kesalahan tata kelola ini itu tidak berdampak bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kita.

Yang kedua, soal LIN Pak. Terus terang Pak LIN ini, ini yang bicara Presiden Jokowi. Saya tidak bosan-bosan bicara soal Lumbung Ikan Nasional ini, kenapa, Pak Jokowi ini 2024 akan turun dan tolong Pak Jokowi sebelum turun buat *legacy* dalam sektor perikanan dan kelautan dan menurut kami *legacy* itu adalah Lumbung Ikan Nasional di Maluku. Kenapa Maluku? Maluku itu ikonnya perikanan dan kelautan Indonesia, 93% luas Maluku itu adalah luas laut. Janganlah Maluku ini dari dulu dari sejak Zaman Neo Kolonialisme kita hanya jadikan Maluku itu sebagai tujuan eksploitasi mulai dari rempah-rempah sampai ikan hari ini. Lalu dampak kesejahteraan buat Maluku ini apa?

Terus terang Pak, Ibu Ketua kita harus hitungin ulang dari perikanan tangkap saja kita bisa menghasilkan 224 triliun. Kenapa target PNBP kita 1,9 T. Lalu kita omong kita enggak ada uang yang benar saja, Pak. Jangan sampai yang paling pestapora ini adalah korporasi besar baik dalam dan luar negeri, Pak. Lalu kita ini hanya menjadi penonton di negara kita sendiri dan nelayan kita itu ibarat semut mati di lumbung gula, kira-kira seperti itu, Pak. Ya mungkin bahasa saya agak-agak tajam, Pak tetapi ya kita mengimpikan bahwa laut itu sungguh menjadi ruang dan sumber hidup bagi mayoritas masyarakat Indonesia.

Terakhir Pak, kemarin kami reses dan juga sempat jalan balik ke NTT dan kemudian kita kemarin ke Morotai Pak itu ada Miamari Pak, kalau tidak salah pembangunan di Morotai dan di Pangandaran itu angkanya sekitar 500 sekian miliar tapi terus terang Pak di dua tempat itu 500 sekian miliar memang bukan era sekarang tapi era sebelumnya Pak. Tapi terus terang Pak, kami mau melaporkan di Morotai itu kosong melompong Pak. Rumputnya sudah setinggi hampir lutut saya, terus tidak ada aktivitas apa-apa di situ kasihan jadi mubazir, Pak. Padahal, angkanya itu ratusan miliar Pak. Nah, mohon ke depan kalau pusat ingin membangun sesuatu, tolong melakukan kajian yang komprehensif.

Dan terakhir, kemarin kami jalan-jalan ke sejumlah tempat Pak, nelayan kita itu mengeluhkan tentang sistem rantai dingin Pak lebih khusus adalah *cold storage* atau mungkin *cold storage* skala kecil. Kalau mereka tidak punya ini kerap kali ikan itu cepat busuk, Pak dan ketika mereka buang lagi ke laut, ombak pukul lagi masuk ke kota mereka dipidana Pak. Ini kejadian di Dapil saya, di Kota Kupang di pelabuhan penangkapan ikan di Oeba di Kota Kupang. Ini nelayan tuh mengeluhkan soal ini, saya kira bukan terjadi saja di Oeba di Kota Kupang tetapi di banyak tempat. Nah, saya mengimpikan laut ini akan menyumbang banyak uang untuk negara kita sehingga kita bisa bangun Lumbung Ikan Nasional, kita bisa bagi ketinting, kita bisa kemudian bagi *cold storage*. Sistem rantai dingin itu bisa Pak. Saya berharap betul kepada Pak Trenggono dan juga Pak Antam dan jajarannya kalau boleh dari sektor perikanan dan kelautan ini kita bisa semakin lebih kaya Pak.

Terima kasih.

Saya kembalikan ke Ibu Pimpinan.

INTERUPSI F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi sedikit Pimpinan. Sedikit saja. Izin ya.

Kebetulan karena tadi Pak Ansi minta data Bu, maksudnya untuk menguatkan. saya ini kan tadi isunya beberapa penangkapan terukur ya. Saya minta tolong juga dong buka peta penangkapan terukur ini, minta data petanya, kemudian juga berdasarkan masing-masing WPP dan kuota ikan yang di dalam situ itu apa saja tolong di *break down* karena dari zamannya Pak Syarif diminta enggak dikasih-kasih.

Terima kasih.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Sedikit lagi, sedikit Bu. Pak mohon maaf, ini saya tidak ingin laut itu kemudian diprivatisasi oleh orang-orang tertentu. Saya tidak ingin laut itu dikomersialisasi untuk kepentingan tertentu. Saya bicara ini ini karena membaca data 224 triliun yang kita tangkap tapi kok penangkapan masuk ke kas negara sungguh sangat kecil.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik.

Terima kasih Kakak Ansi catatan kritisnya, Pak.

Saya pikir waktu kita pernah FGD ini menjadi, menjadi apa menjadi perdebatan yang lumayan seru juga, jujur menjadi *concern* kita semua saya

juga termasuk yang bertanya tentang keberpihakan terhadap nelayan rakyat begitu nelayan kecil. Strategi yang dipakai dengan penangkapan terukur itu loncatan kalau menurut kita ya, loncatan yang bagus tetapi harus dicatat sedangkan yang tadi data yang tadi disampaikan oleh Pak Ansi, kekayaan kita yang luar biasa, target kita terlalu kecil dan ini sudah kita wanti-wanti juga jangan hanya menguntungkan korporasi saja. Itu sudah, sudah sangat sering dan hampir setiap saat kita apa kita omongkan itu juga, termasuk data yang diminta Bu Kiki juga nanti silakan dipaparkan.

Saya pikir itu, silakan Pak Sekjen untuk memberikan tanggapan.

Mas Ketua ada yang mau di, enggak oke.

SEKJEN KKP RI:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih.

Luar biasa apa masukannya, ini mohon maaf tidak berurutan yang hangat saja dulu tentang tadi, Pak Lema menyampaikan tentang sumber daya yang diambil dari laut itu sampai 220 triliun *kok* kita cuman dapat 1% pun tidak begitu. Justru itu kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan adanya penangkapan terukur, mudah-mudahan kita bisa lakukan mudahan, harusnya kita mendapat lebih karena pasca penangkapan mereka dikenakan apa tarif, ditarik dari situ. Yang selama ini kenapa *kok* baru dapat 1,9 targetnya karena kemungkinan hitungannya penangkapan terukur belum sepenuhnya 100% bisa diterapkan. Jadi masih didapat dari terutama perizinan, sedangkan nanti kan tidak ada izin, yang ada adalah ditarik setelah atau pasca penangkapan. Nah, ini kenapa Pak Menteri kemarin atau Kementerian Kelautan berani mengancer-ngancer atau menargetkan 12 triliun di tahun 2024. Pelaksanaan dari penangkapan terukur ini sudah dilaksanakan sedangkan tahun ini belum masih pasca sosialisasi karena masih banyak nelayan kecil yang merasa dia akan ditarik. Padahal, untuk nelayan kecil tidak akan ditarik pasca penangkapan apa terukur ini hanya karena korporasi banyak duitnya mungkin mempengaruhi ke masyarakat seolah-olah semua akan ditarik retribusi atau pajak atau PNBP mereka. Akhirnya harus kami *door to door* menerangkan bahwasanya untuk nelayan kecil tidak akan ditarik apa iuran, bukan iuran apa pajaknya.

Lalu selain itu uang yang akan di atau PNBP yang didapat itu akan pasti dikembalikan kepada masyarakat, banyak ya apa program-program kita nanti mungkin terutama yang dari aspirasi untuk mungkin apa asuransi, untuk pengembangan budidaya terutama akan dikembalikan kepada nelayan kecil. Itu tentang PNBP, Pak Lema.

Nah, setiap RDP selalu menyampaikan tentang LIN. Kami akan kembali mengupayakan LIN ini untuk Maluku, Maluku Utara juga termasuk sebagai lumbung ikan nasional sebagai kebanggaan masyarakat Ambon. Kebetulan saya hampir 15 (lima tahun) dinas di sana, saya merasakan di sana enggak perlu pakai pancing itu pakai tombak saja bisa dapat ikan itu.

Kami akan mengupayakan lagi untuk menghidupkan kembali Lumbung Ikan Nasional di Maluku.

Selanjutnya, untuk Bu Endang

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Sekjen, sebentar.

Tadi Pak Ansi sempat menyinggung ada 2 (dua) proyek KKP yang menelan dana cukup besar satu di Pandeglang satu di Morotai ya. Ini kalau enggak salah dulu ini adalah proyeknya dari BRSDM bukan, badan riset itu bagian dari badan riset kalau saya tidak salah. Saya kalau bisa diperjelaskan nanti ini nanti kedepannya seperti apa. Ya, tadi sudah dilaporkan sekarang sudah antah berantah sudah seperti gedung ditinggal lagi, Pak Ansi. Ya ini kan ini kan ini kan tadinya tujuannya sebenarnya juga cukup baik. Saya ingin saya kira kita ingin mendengarkan kejelasan ini nanti kedepan seperti apa dan apakah itu akan menjadi bagian masih dari KKP, apa nanti pindah ke BRIN ya.

Silakan, Pak Sekjen.

SEKJEN KKP RI:

Terima kasih.

Untuk Miamari itu sudah menjadi temuan BPK. Jadi ada proses-proses yang harus ditindaklanjuti yang ditanyakan selain hanya, bukan hanya di sini, kami selama dari awal sampai ini belum selesai memang karena kerugian negara, menimbulkan kerugian negara, ada proses-proses yang harus diselesaikan menurut peraturan di apa di BPK. Tapi karena tidak bisa diserahkan, itu tetap masih di KKP jadi tanggung jawab kami sebagai petugas sekarang di KKP. Nanti hasil audit atau hasil apanya akan nanti kami sampaikan dan tindak lanjutnya untuk, istilahnya jangan siapa ini sudah terbuang sama sekali begitu, apakah masih bisa dimanfaatkan untuk apa..

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Artinya sekarang dihentikan terlebih dahulu, Pak Sekjen?

SEKJEN KKP RI:

Tidak dilanjutkan itu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ya, sekarang lagi berhenti ya?

SEKJEN KKP RI:

Berhenti, berhenti sekarang. Itu status proyeknya atau kegiatannya sudah dihentikan karena kan kalau diteruskan kan ada lebih, lebih menimbulkan kerugian negara.

INTERUPSI F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan, boleh? Mumpung...

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan, Bu.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Boleh Pak Sekjen ya? Bu Pimpinan boleh ya? Ini mumpung Pak Budi lagi membahas. Jadi waktu rapat kapan, rapat beberapa kali saya minta tolong inventarisir *item-item* mangkraknya KKP waktu itu, berapa kali loh saya minta. Ini berpengaruh dengan cita-cita KKP *pengen* dinaikkan anggaran waktu itu kan. Bagaimana mau dinaikin anggaran, kalau temuannya banyak Pak. Ini logika berpikirnya seperti itu. Jadi tolonglah data-data yang diminta, nanti saya apabila berkenan tolong Pimpinan dimasukkan ke dalam kesimpulan rapat. Jadi jangan apapun yang kami minta di sini dianggap angin lalu, begitu jadi itu.

Terima kasih Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Lanjut Pak Sekjen.

SEKJEN KKP RI:

Terima kasih.

Jadi catatan harus segera menjadi nanti ada jawaban tertulis langsung ada lampiran yang diminta oleh Bu Kiki. Bu Kiki kami janji di laporan jawaban ini yang tertulisnya akan disampaikan lampiran data Ibu, kalau enggak digantung saja besoknya.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan izin. Bisa?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan Bu Alien.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS, S.H.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.
Selamat siang.

Mohon maaf lahir dan batin Pak Sekjen dan jajarannya.

Saya ingin menyampaikan tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Ketua terus juga Pak Ansi Lema dan juga ini tadi ada penjelasan sedikit singkat dari Pak Sekjen tentang Miamari yang ada di Pulau Morotai. Tentunya saya tidak hanya fokus sama Miamari saja tapi ada SKPT juga yang ada di Morotai, karena itu kemarin Pak Menteri sudah datang di Morotai walaupun cuman sebentar setidaknya sudah menginjakkan kaki di sana. Banyak hal yang perlu diperhatikan Pak, karena kita berbicara soal PNBP, kita berbicara juga tentang apakah peraturan untuk bagaimana sih hasil tangkap yang sudah ditangkap di perairan Provinsi Maluku Utara maupun Maluku yang masuk dari beberapa zona itu untuk bisa didata, di detail sedetail-detailnya nanti akan menjadi asupan untuk pemasukan bagi daerah dan juga negara.

Kemudian tadi sudah disampaikan disinggung tapi saya mau sampaikan Pak, Pak Sekjen. Di Morotai itu di SKPT yang dipakai oleh pemerintah daerah dan juga salah satu pengusaha, ada ekspor ikan dari Morotai tapi itu langsung bukan ke negara tujuan tapi harus transit di Vietnam. Apa yang menjadi dasar kita sebagai KKP ini untuk melakukan *lobbying* bahwa ikan yang hasil tangkap dari Indonesia atau dari perairan Indonesia ini kenapa enggak langsung di negara tujuan. Kenapa harus di-*barcode* oleh Vietnam? Ikan-ikan kita yang di-*barcode* dari Vietnam. Bagaimana PNBP-nya Pak? Bagaimana pajaknya?

Kalau seandainya kemarin Pak Menteri, hari pertama bertugas dan rapat bersama dengan KKP menyampaikan bahwa 2024 akan mencapai 12 triliun, kalau memang *Lobbying* yang dilakukan oleh KKP yang pergi ke luar negeri maupun membawa hasil pinjaman dari luar negeri ke sini, saya pikir target kita bisa melebihi apa yang kita inginkan. Ikan bukan tanaman Pak, diberikan pupuk dan diberikan siraman air, ikan ada di dasar laut dan enggak dikasih makan, kan tinggal ditangkap. Masalahnya seberapa besar kepedulian dari KKP dan pemerintah Republik Indonesia ini terhadap nelayan kecil? Bagaimana dengan nasib mereka, asuransi nelayannya, kapal tangkapnya, alat tangkapnya bagaimana?

Kita ngomongin Lumbung Ikan Nasional di Maluku dan Maluku Utara bukan sekali Pak, tapi ini kayaknya hanya ada hanya berbunyi-bunyi saja tapi *ndak* ada juga perkembangannya. Katanya Pak Menteri dan KKP menyampaikan akan disampaikan ke Presiden. Saya pikir dalam setahun bisa berapa kali Presiden bertemu dengan Menteri KKP. Fokusnya seperti apa dari KKP?

Sudah berulang kali juga kami menyampaikan tentang KSDHAE konservasi laut dan kami Komisi IV sangat berharap bahwa KKP memiliki fungsi dan peran dan juga menyiapkan peraturan untuk mendukung ini. Sebentar, kalau enggak salah di Baleg akan dibahas ya? jam 1. Pak Sekjen, saya ingat betul Bapak menyampaikan akan dipersiapkan dan dipersiapkan dan dipersiapkan tapi sampai saat ini belum ada perkembangannya, Pak. Bagaimana kita berbicara soal PNBP, sekarang laut kita saja dijual tanpa ada aturan yang jelas dan itu sering terjadi, Pak. PNBP kalau memang hasil tangkap saja enggak bisa juga Pak, tapi sumber daya hayati yang ada ekosistem yang ada di laut pun harus kita lihat dan itu terjadi ilegal terus, terumbu karang yang diambil dan dijual.

Kemarin kita turun juga Pak, selain hasil tangkap ikan, rumput laut ini juga menjamin bagi para nelayan tapi masalahnya apalagi? Bagaimana KKP mempersiapkan benih atau rumput laut dan bagaimana untuk penanganan jamur atau apa yang selalu terkena di-rumput laut tersebut? Mereka menginginkan sekali sentuhan dari pemerintah. Saya pikir kita dengan anggaran yang sedikit ini yang *Insyah Allah* kalau memang dipercaya bisa diberikan tambahan, kita fokus-fokus dulu lah yang mana betul-betul mengena dan langsung tepat sasaran kepada nelayan.

Kemudian kita juga enggak mau Pak kalau seandainya KKP berhasil nilai Nilai Tukar Nelayannya bagaimana, naik kah turun kah? Tapi walaupun begitu kita harus memberikan apresiasi bahwa KKP telah mendapatkan apa ya menghasilkan PNBP hampir kurang lebih 900 atau 1 triliun *Insyah Allah* dan itu target yang harus kita apresiasi daripada tidak sama sekali.

Pak Sekjen, saya harap Bapak pernah ada di Maluku. Kami titipkan bagaimana tentang perjuangan masyarakat di sana, bukan hanya di Maluku dan Maluku Utara tapi khususnya daerah Timur hampir semua pemerintah kami mau berubah Pak. Kita mau punya *cold storage*, kita mau punya pabrik es. Pemerintah daerah sudah mempersiapkan karena kita bilang enggak bisa turun kalau tidak ada PLN, mereka siap, Pak. Tolong bantu karena mereka di pulau-pulau, Pak. Mereka ada di pulau-pulau, mereka enggak bisa lagi menyebrang untuk mengambil es terus balik lagi, berapa ongkosnya, Pak. Mohon ini diperhatikan.

Saya mau sampaikan kalau seandainya KKP mempunyai *targeting* yang jelas *Insyah Allah* ini semua akan berjalan baik. Tapi, kalau enggak punya *targeting* yang jelas, mohon maaf Pak saya juga pesimis. Jadi kita minta seperti itu Pak dan kita meminta Dirjen Tangkap sesuai dengan peraturan ini PP 85 tolonglah kita. Kan kemarin kita dijelaskan ada zona. Ada beberapa zona tidak bisa disamakan harganya. Kita minta jenis-jenisnya apa saja sehingga kita bisa melihat bahwa target dan sasaran dari PP 85 ini tepat.

Terima kasih Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan dilanjutkan, Pak Sekjen.

SEKJEN KKP RI:

Terima kasih.

Kebetulan menyambung Ibu dengan Pak Lema tentang rantai dingin atau *cold storage*. Ternyata Pak, di Kupang saat ini sedang dibangun Pak pabrik esnya di Kota Kupang, di Kota Kupang. Kapasitas 20 ton ya, 20 ton per hari itu nanti selanjutnya ya ke Timur lagi bulan Juli selesai ya, *Insy Allah* bulan Juli selesai nanti kita ke Utara, Maluku Utara. Jadi mohon maaf apa enggak bisa semuanya, dicicil sesuai dengan nomor urut pertanyaan.

Selanjutnya Bu Endang dengan tadi Bu Endang bertanya juga ada masukan beberapa orang tentang 0% kenapa harus lewat Vietnam. Mohon maaf, Indonesia ini lebih duluan merdeka mungkin tapi *lobby*-nya atau perundingannya rada lelet begitu. Jadi Vietnam, Filipina 0%, kita masih ada beberapa negara yang sebetulnya tidak seluruhnya mengenakan pajak (suara tidak jelas) kan terdiri dari beberapa negara. Jadi itu yang masih kita kejar terus supaya kita bisa juga dipersamakan dengan Vietnam dan Filipina terutama yang dalam apa dalam mengekspor biaya masuknya dikenakan 0% karena 15% itu luar biasa besar. Jadi tidak mungkin kita bisa bersaing dengan mereka kalau ikan kita lebih harus lebih apa spesifik, yang diterima itu spesifik tapi kalau yang sama-sama itu kita kalah bersaing di Eropa.

Untuk perundingan (suara tidak jelas). Ya untuk target kita belum berani tapi kita upayakan di tahun ini. Kebetulan Bapak Menteri pun sekarang sedang ke Eropa, selain itu juga membawa misi untuk apa mengangkat isu ini untuk pengenaan 0% di produk perikanan untuk negara Republik Indonesia. Kenapa mereka lewat Vietnam? Menumpang, di Vietnamnya mungkin dapat *fee* berapa, lalu supaya dikenakan 0% itu jadi pengusaha kita ya pintar juga masih itu satu siasat, jadi hebat lebih hebat mereka daripada pemerintah, kita akui. Itu untuk yang apa pengenaan 0%.

INTERUPSI:

Pendalaman, Pimpinan.

SEKJEN KKP RI:

Selanjutnya Bu Endang juga menanyakan tentang penyelundupan BBL. Terima kasih Bu. Ini PR besar Bu. Jadi yang kami laksanakan sekarang tidak kami bisa mengandalkan hanya KKP hanya berapa oranglah KKP itu PSDKP-nya. Kami terus melakukan kerja sama dan membuat Satgas dengan beberapa kementerian, ada di situ TNI dan terutama Polri yang sebagai penegak hukum yang terakhir ditangkap di Sumatera Selatan luar biasa besar penyelundupan BBL ini. Dengan adanya larangan ekspor, pasti yang mereka lakukan adalah melakukan penyelundupan karena hasilnya luar biasa besar.

Untuk perlindungan nelayan Ibu Endang tanyakan, yaitu tentang reklamasi, itu kita sudah beberapa saat yang lalu dihentikan seluruh reklamasi. Sekarang ada beberapa perusahaan yang sudah kita apa hentikan

kegiatannya karena mereka memang merusak dan tidak melindungi nelayan kecil.

Untuk sosialisasi ya kami akui, Bu baik pelaku apa tentang penangkapan terukur, tentang apa konservasi tentang apa memang kita kekurangan, kami akui, Bu di KKP dan kami akan berusaha meningkatkan tentang sosialisasi kepada nelayan tentang benih untuk meningkatkan kesejahteraan.

Lalu tentang bantuan-bantuan yang Pak, bantuan-bantuan ikan, Pak Edward juga Pak Hanan bertanya atau beberapa anggota untuk kapal alangkah baiknya kalau ketinting. Kami berjanji tahun depan ada lagi kapal tapi ketinting pun kalau boleh ini usulan di sini mumpung kita sama-sama di sini itu pun dipersedikit, kita perbanyak bioflok sajalah kayaknya kalau boleh tapi ketintingnya tetap ada. Karena kalau di ini kalau di bioflok itu kan kayaknya kurang-kurang diminati untuk di Maluku Utara, Maluku itu kan tinggal mengambil kan di NTT. Saya di NTT tiga tahun setengah Pak, saya tahu juga di sana ikan luar biasa, ikan luar biasa apalagi dicampur boke itu aduh wah. Boke itu kue, Bu. Boke ada rumput-rumput, waduh. Ada kue Bu kue rumput-rumput mungkin itu luar biasa. Jadi yang diperlukan memang ini kami akan terus mempertajam apa mengerucut keperluan-keperluan di daerah jangan boleh diapa disamaratakan karena kayak rantai dingin yang diperlukan di daerah Timur juga daerah Utara, terutama di Timur, tapi kalau yang tadi bioflok itu kayaknya di sana enggak perlu. Orang sana enggak ada yang mau makan lele begitu kan, karena ada pecel lele saja sekarang mereka tahu lele itu, karena ikan lele itu ikan darat itu enggak kemakan di sana, apalagi ikan mas enggak akan laku, pepes mas itu apa begitu. Itu yang kami akan sampaikan, yang kami sampaikan.

Lalu Pak Dhevy tadi bertanya tentang pelatihan-pelatihan yang ditingkatkan karena kami berusaha juga untuk pajak kita 15% sudah tadi disampaikan, untuk perluasan ekspor ya ini PDS, kerja keras dan nanti di bulan Juni kalau enggak salah dia, untuk ikut pemasaran internasional.

Mungkin itu, kami sampaikan mungkin yang lain nanti akan kami kirim tertulis termasuk lampiran untuk khusus, Bu Kiki.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Mbak Luluk silakan, ya setelah itu Pak Darori.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Ya, terima kasih Ibu Pimpinan.

Pak Sekjen, dan Bapak Ibu Eselon I yang hadir,
Bapak/Ibu Anggota yang berbahagia.

Terima kasih.

Saya kira saya juga membaca ini materi yang disampaikan oleh Pak Sekjen ya soal perencanaan, kemudian juga penerimaan. Apalagi dengan apa dulu ya keinginan ambisius dari Pak Menteri yang 12 triliun, kita dulu sempat terperangah dan ada sebagian yang mau melompat dari kursi karena sebenarnya dulu kita ini sangat optimis Pak ya, jadi menyambut baik optimis karena menteri baru dan rasanya baru pertama dengar ada menteri yang sebegitu optimisnya untuk bisa menggagas soal PNBP yang semula memang sangat kecil ini dengan angka yang sangat begitu fantastis. Hanya saja memang dulu juga kita sudah tanyakan bagaimana *Road Map* untuk bisa mencapai 12 triliun itu.

Nah, kalau kita lihat dari laporannya yang disampaikan oleh Pak Sekjen ini kan masih sangat kecil sekali untuk bisa mencapai 12 triliun. Hambatannya apa untuk bisa sampai ke sana? Nah, ini kan yang paling penting hambatannya apa? Kendalanya apa? Atau penyimpangannya ada di mana? Penyimpangan itu penyimpangan dari target ya dan yang kemudian tidak bisa dimungkinkan realisasinya. Sementara di sisi lain bahwa kenaikan tarif PNBP ini sudah diterapkan. Bahkan, kita juga mendapatkan masukan dari para nelayan kecil khususnya yang mereka dikenai PNBP 5% pra-produksi untuk ukuran kapal yang bahkan 5 di bawah 60 GT. Ini, ini berat buat mereka itu, Pak. Di sisi lain bahwa PPI, infrastruktur ya ke sarana prasarana itu juga masih sangat terbatas tetapi kemudian kenaikan PNBP-nya itu sudah diterapkan kepada mereka.

Nah, di sisi lain ini ada *problem* yang kita temukan dan kita dengar, nah ini perlu dicek dan diklarifikasi oleh KKP adanya model *Transshipment* atau pindah perpindahan ikan dari kapal ke kapal cukup dilepas di laut sehingga enggak perlu dibawa ke daratan. Nah, kalau kemudian di laut ya enggak ketahuan karena begitu sampai di daratan enggak dia bawa itu ikannya sehingga enggak bisa dihitung enggak bisa dinilai. Kenapa? Karena salah satunya kenaikan tarif PNBP, ini khususnya yang terjadi pada kapal-kapal yang ukurannya tadi, Pak yang sekitar 5 GT dan di bawahnya 60 GT itu. Nah, apakah ini sudah diketahui oleh KKP? Apakah ini juga termasuk yang kemudian diawasi? Apakah ini yang kemudian termasuk akan ditertibkan kalau memang tahu? Nah, kalau enggak tahu ya masalahnya beda lagi, *wong* enggak tahu, apa yang mau akan ditertibkan. tetapi kalau misalnya saya saja yang tidak ada di KKP mendengar berarti kan sudah terjadi yang namanya praktik-praktik *Transshipment* ini, jadi perpindahan hasil tangkap itu pindah dari kapal ke kapal kemudian hilang begitu saja ya kan.

Nah, kemudian yang berikutnya, Pak soal kenaikan penerimaan ini walaupun tadi teman-teman sudah mengapresiasi KKP ya. Saya juga iya kalau dilihat dari tahun 2015 ya memang iya, tetapi lagi-lagi kalau ini kita komparasikan dengan target yang sangat ambisius dari KKP ya sebenarnya agak sulit kalau kemudian ini kita lihat sebagai prestasi KKP karena faktanya pertama, pungutan ini juga melemahkan produktivitas nelayan kecil, mencekik perekonomian nelayan yang 5 GT. Di sisi lain kemudian juga target ekspor kita masih cukup kecil. Bahkan, sekali lagi saya selalu dulu mengingatkan kenapa kita ini kok terus menerus di bawah Vietnam. Tadi Mbak Alien malah menyebutkan *barcode* saja kemudian harus ada label Vietnarnya.

Nah, kalau kemudian target besar dan pungutan besar tetapi kemudian kita meninggalkan kesengsaraan kepada nelayan kecil, saya kira bukan itu yang kita harapkan, Pak. Yang kita harapkan itu kan PNPB-nya gede ya kan, pendapatan negara juga besar tapi nelayan kecilnya itu *happy*. Nah, itu baru, baru prestasi begitu loh. Tapi, kalau kemudian targetnya besar, penerimaannya juga memang bertambah, tetapi ternyata ada komunitas nelayan kecil yang itu memang harus dilindungi berdasarkan amanat juga undang-undang, kemudian mereka yang mengeluh dan semakin terpuruk, saya kira ini kita bisa punya dosa juga kalau caranya begitu menggencet yang kecil tetapi kita tidak menjangkau kelompok yang besar atau korporasi. Padahal, di sana sebenarnya sumber pendapatan yang bisa dikejar oleh negara atau dalam hal ini adalah KKP.

Nah, mestinya itu yang kita dulu tanya, *Road Map*-nya bagaimana? bukan hanya sekedar menaikkan tarif apalagi takutnya menyasar kelompok kecil juga tanpa ampun begitu. Nah, bagaimana menjangkau yang kelompok yang besar nelayan yang besar korporasi yang besar. Sampai sejauh ini berapa persen dari target untuk bisa menyasar kapal yang besar ya Pak ya dari sisi penerimaan dari target 100% bisa mencapai berapa persen. Nah, kita juga ingin yang seperti itu.

Kemudian yang berikutnya Bapak, bahwa masalah yang lain saya kira stagnannya nilai ekspor kita dibandingkan Vietnam juga bolehlah dilaporkan ke kita. Ini masalahnya problemnya itu di mana? Apakah ini kaitannya dengan diplomasi internasional, kemudian soal aturan atau regulasi ataukah karena memang apa ya ikan kita kualitasnya yang kurang bagus seperti dulu. Saya sampaikan di Amerika juga sempat ada beberapa yang sempat kena *banned* begitu ya atau karena tidak sinkronnya aturan di internalnya KKP antara apa namanya daya saing kemudian karantina sehingga ada tabrakan regulasi dan kewenangannya? Nah, yang kayak begini-begini jangan sampai terulang kembali.

Saya kira Ibu Ketua, yang terakhir kita minta ya transparansi dalam hal pungutan hasil perikanan ini. Jadi yang kita minta Komisi IV benar-benar memberikan penekanan kepada KKP bahwa harus ada transparansi yang terkait dengan pungutannya kemudian aturannya, termasuk juga pemanfaatan dari PNBPN ini. Jadi jangan sampai PNBPN masuk tapi kemudian kita enggak tahu itu larinya ke mana.

Saya kira itu Pimpinan dan Pak Sekjen.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik.

Terima kasih.

Pak Darori, silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU.):

Terima kasih, Bu Ketua.

Pak Sekjen, teman-teman Eselon I, dan
Teman-teman Anggota Dewan yang kami hormati.

Bahwa kita bicara PNBPN, saya akan memberi masukan ya. Jadi begini Pak Sekjen, kita tahu Pak bahwa fakta dan kenyataannya salah satu PNBPN yang, yang apa namanya yang mungkin terlupakan tidak menjadi perhatian khusus mengenai lobster, Pak. Suka tidak suka di Vietnam itu lobster masuk terus penyelundupan. Apa terobosan KKP sehingga ini bisa menghasilkan kalau 1 ekor sekian puluh ribu kan luar biasa Pak. Kalau hanya melarang-larang begitu enggak bisa Pak. Ini baru kemarin saya kira di Surabaya ditangkap. Saya pernah memberikan masukan pada menteri sebelumnya, apakah tidak mungkin kerja sama Pak, kita bibitnya kirim ke sana 40% hasilnya untuk Indonesia, 60% untuk Vietnam, itu terbuka. Sekarang Vietnam itu hampir 80% eksportnya lobster dari Indonesia yang dibesarkan dan kita tidak bisa bersaing dengan kiriman dari Vietnam ke Cina ke Korea, Jepang karena lebih dekat alat angkutnya daripada Indonesia. Ini tolong mungkin dipikirkan, Pak. Kalau hanya mengandalkan ini tadi 635 miliar mungkin satu tahun ini satu triliun, berarti Bapak setiap tahun disubsidi dari kementerian lain 500% anggarannya. Ini perlu kita pikirkan dan itu banyak Pak peluang-peluang yang bisa diambil.

Yang kedua juga saya katakan bahwa nanti jam 1 ini mohon izin Bu Ketua ini Panja Undang-Undang 590 konservasi, Bu Endang, Bu Luluk, saya semua ini Pak Hendro, mohon izin ke Baleg, Bu karena kita akan membahas. Jadi begini masalahnya ...

WAKIL KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Kita sudah selesai tadi, Pak.

F-P. GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU.):

Iya, jadi masalahnya bahwa di Kehutanan itu kita sudah memberikan rekomendasi diundang baru karena *vocal point* dalam di SE itu tetap Kehutanan, maka kuotanya itu Kehutanan yang mengeluarkan izin nanti KKP. Tolong Pak Sekjen bentar lagi ini selesai undang-undangnya akan dikirim ke pemerintah, Bapak akan membahas dengan Kehutanan mungkin agak ribut. Prinsipnya silakan Kehutanan kasih kuotanya, kami yang keluarkan izin karena undang-undang Pak, KKP saja. Ini tolong konservasi ya, di Undang-Undang KKP ada yang izin kan di KKP misalkan ikan napoleon, ikan arwana terus terumbu karang, terus buaya dan sebagainya. Itu tolong nanti diambil, jadi pungutannya ada di KKP. Nanti tapi nampaknya Kehutanan ini keberatan. Saya sudah tahu saya malah seolah-olah enggak mendukung Kehutanan bukan itu. Masing-masing kita hormati. Di KKP ada kewenangan ya izin, kuotanya dari Kehutanan karena ini *vocal point*-nya di negara kita ditugaskan Kehutanan.

Tapi ada masalah Pak Sekjen, pada tahun 2009 waktu Sekjennya Pak Syamsul, saya Dirjen di sana minta bagian tugas kawasan konservasi laut diserahkan ke KKP. Kami tidak menyerahkan, Pak 8 taman nasional konservasi laut ya. Perjanjiannya akan ditambah lagi kalau sudah dievaluasi oleh BPKP tapi sudah 12 tahun sampai sekarang belum Pak. Jangan sampai nanti ditagih Pak ke dalam pertemuan mana hasilnya. Bahkan, saya lihat Pak ini mestinya kalau sudah taman nasional atau konservasi laut ada UPT-nya Pak, ini saya dengar malah diserahkan ke dinas Pak, itu enggak pas. Di Kehutanan konservasi itu punya 80 UPT loh Pak. Jadi tolong ini dalam waktu yang tidak lama ini akan dibicarakan. Kalau sempat ini ditagih wah bingung jawabnya. Tolong dievaluasi ya kedepannya ya karena saya tahu Bapak kalau semua masih sentralistik di Jakarta pungutan-pungutan itu tidak akan dapat, Pak. Tolong dijabarkan lagi seperti taman nasional ini yang 8 ini bikinlah UPT Eselon 3, Eselon 4 enggak apa-apa. Jadi langsung di lokasi mengawasinya Pak, jadi itu ada wisata alamnya, Pak itu. Banyak sekali lokasi untuk wisata alam, sekarang bebas malah orang lain yang mengelola. Ini kemenangan di KKP nanti, jadi banyak sebetulnya kalau harapan saya ke depan tidak subsidi lagi 500%. Kalau anggaran Bapak 6 triliun hasilnya 1 triliun kan disubsidi. Sekarang Kehutanan malah menyubsidi yang lain sudah hasilnya hampir 7 triliun PNBP-nya. Saya kira bisa ditiru banyak Pak ya itu arwana, buaya ya itu ikan napoleon jadi saya kira itu.

Dan yang terakhir tadi soal ada laporan Pak Sekjen, tolong Pak ini masalah bibit ikan indukan dan sebagainya. Lebih besar jari saya daripada beli indukannya Pak, ini jadi saya diprotes, "Ini induknya yang mana Pak?" "Yo kuwi". "Kuwi?" "Yo kuwi". "Oh ngene toh?" "Yo yo ngono kuwi". Jadi saya kadang-kadang bela Pak Sekjen dan Pak Dirjen ya itu tolong ini di, satu. Yang kedua, terlalu jauh Pak sumbernya. Jadi sampai lokasi habis 80, 70% mati karena oksigennya enggak cukup. Nah, ini tolonglah ya ini, ini terutama di Sumatera ini di Jambi Pak mau kirim ke Aceh ke Lampung itu luar biasa. Ini, ini saya diingatkan oleh yang menerima ya, saya kira saya teruskan saja begitu.

Dan saya mengira demikian Bu Ketua dan saya mohon mungkin ditugaskan ke sana nanti mudah-mudahan tidak lama ini diselesaikan sehingga bisa bagi waktu ke Baleg.

Terima kasih, Bu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik.

Ibu Riezky Aprilia.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih, Bu Ketua.

Singkat saja. Tadi Pak Darori sampaikan teman-teman sampaikan Pak Edward juga tadi saya dengar sempat sampaikan. Kalau saya tidak mau membahas benih dan indukannya karena pakannya itu tahun ini tiga kali lipat sudah naik ya. Ini PR buat Ibu, benih ini pembudidaya ya jadi percuma indukannya bagus, indukannya gede yang gede kalau pakannya kagak jelas ya sama saja, yang kecil mati itu kalau sampai pakan karena produksi pakannya ini kan luar biasa. Saya garis bawah Pak Sekjen, ini buat Pak Sekjen apa sebagai informasi mungkin enggak terinformasi, tiga kali naik. Tolong Dirjen Budidaya untuk membuat *Road Map* ya. Jangan bikin program halusinasi terus, kasihan menteri sama Sekjennya masuk ke ruang sini nanti pusing lagi.

Yang kedua, sekali lagi Ibu Pimpinan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami meminta kesimpulan tadi nanti tolong TA, Mas Andi, Komisi IV itu meminta data, data PNPB di luar Kesekjenan Irjen ya Kementerian Eselon I teknis, kedua, peta penangkapan perikanan terukur di masing-masing WPP dan masing-masing kuota jenis ikan, ya tolong ya itu saja.

Terima kasih, Bu Pimpinan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pimpinan, sedikit saja.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Sedikit ya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Ya, sedikit.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Ibu Nur'aeni juga antre.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Pak Sekjen sedikit yang soal PP Nomor 85 Tahun 2021 itu. Itu kan ada kebijakan PNPB yang ditarik untuk kapal 5 GT itu sama juga dengan 30 GT kan begitu. Nah, itu nelayan itu mengeluhkan juga soal itu. Nah, kita pingin mendapatkan penjelasan soal itu sebenarnya supaya mereka juga bisa mana memahami.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Silakan, Bu Nur'aeni.

F-P. DEMOKRAT (HJ. NUR'AENI, S.Sos, M.SI.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan beserta Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Sekjen beserta jajarannya.

Mohon maaf lahir batin untuk kita semuanya.

Saya hanya sedikit menanggapi, serta mungkin memberikan saran masukan berkaitan dengan target realisasi PNBP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Tentu yang pertama ada pertanyaan yang memang harus dijelaskan ya dari Sekjen beserta jajaran. Mengapa konversi nilai produksi ke nilai PNBP ini belum optimal? Kalau dilihat dari nilai produksi tahun 2020 luar biasa di-angka 224,8 triliun tapi nilai PNBP-nya hanya mencapai 0,26%. Ini mohon dijelaskan secara detail ya apakah kendala di lapangan itu seperti apa? Apakah memang dari Kementerian KKP ini tidak mampu ataupun ada mungkin seperti misalkan pendapatan yang tidak terkelola dengan baik, yang memang selama ini mungkin ada ruang ya untuk bisa dilakukan pemanfaatan yang mohon maaf mungkin ada ruang untuk bisa dipungut secara ilegal itu. Karena tidak mungkin produksi meningkat tapi PNBP kenapa hanya 0,26%, kan sangat miris sekali.

Berikutnya, menanggapi kaitan regulasi terhadap kebijakan penangkapan ikan terukur melalui PP 85/2021. Tadi juga teman-teman sudah mempertanyakan mengingat kebijakan yang terdahulu ini kan ditetapkan hanya 30 kapal jenis 30 GT saja yang dipungut ya melalui pungutan PHP, akan tetapi melalui regulasi terbaru PP 85/2021 ini dari mulai kapal ukuran 5 GT sampai 60 GT ini sudah dipungut kena tarif 5% 60 sampai 1000 10% 1000 GT ke atas 25%. Ini juga sangat dikeluhkan oleh para pelaku usaha kita. Nah, tentu dari harga patokan jenis ikan terhadap regulasi yang baru kalau yang lainnya ini tidak ada yang berubah ya hanya ada ekstensifikasi pungutan terhadap ukuran kapal, serta berpengaruh terhadap harga patokan jenis ikan naik secara signifikan, akan tetapi ini dari jenis udang ini mengalami penurunan harga di-angka Rp1.000,-. Ini mohon dijelaskan ya dari tadi yang disampaikan terhadap regulasi yang terbaru ini mohon penjelasannya secara detail ya.

Nah, tentu agar upaya PNBP ini bisa tercapai, walaupun ada target dari Menteri KKP 12 triliun, tadi teman-teman bicarannya ini seperti mimpi di-siang bolong tapi kita juga mendorong agar PNBP ini terealisasi secara realistis sesuai dengan mungkin kebijakan yang penangkapan ikan terukur. Jadi saat menetapkan realisasi PNBP juga harus terukur dan realistis. Jangan sampai mimpi di-siang bolong, ternyata kan tidak mampu di mau akhir 2022 saja kan hanya mampu di angka berapa 34% saja. Nah, kami mendorong bahwa kenaikan PNBP tidak hanya melulu kita ini menghitung dari kenaikan semua jenis kapal, ada 5%, 10%, 25% akan tetapi harus ada pengecualian, tidak disamaratakan pelaku perikanan yang memang hanya mampu menangkap ikan sekian ton ya untuk penerimaannya juga harus disesuaikan. Jadi harus ada pengecualian serta terbuka, transparan agar para pelaku

usaha juga tahu kewajiban-kewajiban apa yang harus mereka penuhi untuk meningkatkan PNBP.

Dan kalau saya melihat, ini juga harus untuk peningkatan PNBP harus didorong terhadap sarana prasarana yang ada, infrastruktur juga harus diperhatikan. Kalau hasil kunjungan sidak kemarin di Muara Baru ini Komisi IV ke sana bulan puasa itu terlihat acak-acakan sekali, kumuh infrastrukturnya, tidak tertata dengan baik, becek dan sebagainya. Bagaimana mau meningkatkan PNBP, serta harus didorong juga nilai daya saing perikanan kita. Kalau hasil kemarin sidak, saya pesimis daya saing perikanan kita ini akan selalu turun. Pantas saja negara-negara luar itu di Uni Eropa tidak mau istilahnya menerima hasil perikanan kita.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih, Bu Nur'aeni.

Terakhir Pak Abdullah Tuasikal silakan yang dari virtual. Singkat padat, sudah belum, ini belum makan siang masalahnya.

F-P. NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih.

Yang saya hormati Pak Ketua, Pimpinan, rekan-rekan Anggota Komisi IV, Pak Sekjen beserta jajarannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Ringkas saja bahwa prinsipnya kami mengapresiasi realisasi PNBP KKP yang semakin tahun semakin meningkat, walaupun masih kecil.

Kami dari Partai Nasdem juga mendukung kegiatan-kegiatan yang berjalan. Namun, perlu kami sedikit mengevaluasi bahwa kegiatan-kegiatan KKP dalam tahun 2021 maupun 2022 ini perlu di kita evaluasi karena kita tahu bahwa negara Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar apalagi KKP sudah serius untuk segera merealisasikan Lumbung Ikan Nasional dan *Insyah Allah* sekarang peraturan presidennya sudah lagi sinkronisasi.

Namun, ada beberapa hal yang kami mau katakan bahwa kenapa kita harus kalah dengan Vietnam, ya karena apapun juga proses rentang kendali atau proses perikanan kita di hulu masih saya anggap itu masih amburadul karena apapun juga kita tahu bahwa kualitas ikan di Indonesia sangat cukup

rendah. Ya contoh di Indonesia timur, di Maluku tadi disampaikan oleh Ibu Alien tadi bahwa penangkapan di mana-mana ini kan kita kurang es, maka kita butuh fasilitas-fasilitas jadi bukan saja di Indonesia Timur tapi juga di daerah-daerah lain. Ini sangat penting dalam rangka menjaga kualitas ya dari proses ikan. Jadi kualitas ikan ini bukan kita sampai di hilir kita hanya di hulu. Kalau hulu tidak maka hilir pun kualitas tidak akan bagus. Ya jadi kalau kita cuma kejar kuantitasnya, maka kita akan kalah dengan negara-negara lain khususnya di bidang ekspor, itu yang pertama.

Kami juga dari Fraksi Partai Nasdem khususnya kami juga mendukung penangkapan terukur, kami sangat mendukung. Namun, harus diperhatikan secara terperinci, bahwa bukan soal penangkapannya tapi pendaratannya juga harus menjadi perhatian. Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa sudah dipersiapkan, saya sudah lupa apa 8 atau di atas 10 apa pelabuhan pendaratan ikan. Saya kira kalau fokusnya seperti itu pengawasannya juga saya kira akan tidak tercapai banyak bisa juga pencurian ikan apa Pak Menteri dulu ya dengan Pak mantan, Pak Eddy Prabowo bahwa Lumbung Ikan Nasional yang ada di Maluku perlu ada satu pelabuhan terpadu secara internasional. Kenapa? Karena untuk itu ikannya harus difokuskan kepada satu wilayah atau mungkin juga 1, 2 wilayah tapi memiliki areal pelabuhan yang sangat besar sehingga bisa melibatkan ya para pengusaha industri apakah apa industri-industri pengalengan ikan, juga menyangkut masalah transportasi keluar masuknya ikan, karena apapun juga ini sangat menghambat ya bukan Maluku tapi Indonesia Timur, pada saat musim ikan itu transportasinya tidak ada.

Ya, untuk itu sekali lagi kami mengharapkan agar penangkapan terukur itu Permennya itu harus benar-benar disosialisasikan, tepat saran, tepat guna untuk kepentingan negara sekaligus juga untuk kepentingan memperdayakan masyarakat lokal, ini yang sangat cukup penting.

Yang kedua, ini menyangkut masalah benih ikan. Ya setiap tahun ini aspirasi kurang lebih sekitar satu juta ekor..

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Ini yang kedua baru ini sudah 20 menit baru yang kedua ya?

F-P. NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.SI.):

Kurang lebih satu juta ekor dan kegiatan ini setahu saya itu sebelum ada distribusi itu ada sistemnya tender, harus ada yang menang dulu. Kalau yang sistem tender kalau ada yang menang itu, maka distribusinya seperti berapa juta ekor yang akan didistribusi. Kenyataan yang ada ya di Maluku ini satu juta ekor, saya enggak tahu ini apa bisa dapat 200 atau 300 ekor benih atau berapa, ya dan rata-rata mungkin 5% yang berhasil bisa juga tidak. Pertanyaan saya, apakah dengan masing-masing ya masing-masing orang aspirasi satu juta ekor ini kalau memang terdistribusi cuma 100 atau 200 ribu lalu sisanya itu seperti apa? Ya, artinya apa pengembalian uangnya seperti apa? Kita tidak bisa membiarkan saja bahwa kalau ada sekian puluh juta ekor

benih lalu terdistribusi sekitar ya 4 atau 30% itu sistem tendernya seperti apa? Pengembalian uang seperti apa? pengawasannya juga seperti apa? Itu yang kedua.

Yang ketiga..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak, izin Pak mau membahas sidang apa KSDA ya?

Cukup Pak? Putus ya? Putus. Dibuka lagi coba sebentar (suara tidak jelas) Pak, dengar enggak, Pak? Halo. Oke cukup kita lanjutkan.

Demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV.

Selanjutnya, persilakan kepada para pejabat Sekjen, Eselon 1 lainnya untuk menjawab pertanyaan para Anggota tersebut. Kami persilakan.

SEKJEN KKP RI:

Terima kasih, Pak Ketua.

Tadi ada tambahan juga kebetulan belum dijawab, yaitu mengenai keberatan-keberatan semua kayaknya anggota dan saya juga keberatan ikut Pak, yaitu tentang bibit itu, Pak ya, Bu ya. Tolong jadi perhatianlah, capek kita di sini tiap hari itu selain besarnya, dulu masih lumayan bibit-bibitnya kecil, sekarang bukan bibit apa calon indukannya pun jadi anaknya Pak. Wah, ya minta tolong ya jangan bikin apa janji palsu. Ini kalau para Anggota Komisi IV di janji palsu bolehlah, masa komandannya juga dijanjikan palsu ya, ya Bu ya tolong. Ini kami tolong kami terus kami apa ditegur selain besarnya sekarang ada masukan lagi Bu, kalau dikirimnya jangan malam hari di waktu orang lagi tidur begitu kan sehingga waktu dihitung kembali jumlahnya banyak yang lompat begitu kan Bu ya tolong diperhatikan. Jadi kita harus turun, nanti sekali-kali saya turun, Pak. Terima kasih Pak Edward dan semua Anggota masukan untuk koreksi kami.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau saran saya jangan ke NTT jauh, mending ke Lampung.

SEKJEN KKP RI:

Enggak, sekarang ada masukan Pak Ketua. Kalau kemarin kan Pak Ketua sibuk dengan apa ukuran begitu kan anaknya sekarang bibitnya pun mengecil juga begitu kan. Apa karena masukan dari Bu Kiki tadi pakannya naik harga tiga kali lipat begitu kan. Ya mohon maaf, terima kasih itu masukannya akan kami perhatikan betul-betul, masukan-masukan terutama yang tentang bibit karena langsung menyentuh rakyat kecil di daerah.

Selanjutnya Pak Abdullah Tuasikal juga tadi Bu Luluk tentang tetap PNBK. Jadi kami mohon bantuan, mohon saran terus tentang PP 85 ini kan

tidak kaku. Kami akan sesuaikan kalau memang pertemuan di lapangan lebih banyak tidak apa mungkin kami akan ada lakukan perubahan bagaimana caranya PNBP bisa meningkat tapi rakyat nelayan kecil tidak terkena imbas, yang kena adalah korporasi-korporasi besar yang memang peningkatan PNBP ini ditujukan untuk rakyat tapi jangan sampai rakyat juga yang dikenakan tarifnya yang paling besar, itu masukan.

Untuk tadi disinggung tentang perundingan-perundingan apa tentang pengenaan pajak 0% di Indonesia, memang kami masih perundingan dan perundingan tentang perdagangan sebetulnya bukan di KKP, yaitu ada di Menteri Perdagangan. Kami akan selalu koordinasi terus dengan Menteri Perdagangan untuk pengenaan pajak di...

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tapi saya yakin Menteri Perdagangan tahu cuman lagi sibuk mengurus minyak dulu.

SEKJEN KKP RI:

Ya itu Pak setelah minyak itu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya sudah menyampaikan puluhan kali dari Menteri Perdagangan yang lalu masalah bea tarif impor kita ke Eropa mencapai 25%, cuma sampai hari ini enggak ada, enggak ada yang ngomong begitu juga Dubes-dubesnya kita yang di luar negeri itu harusnya mereka kan yang melobi bicara kepada pemerintah setempat ya.

Lanjutkan.

SEKJEN KKP RI:

Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Cukup? Sudah siapkan kesimpulan rapat? Tampilkan. Jangan berpanjang-panjang.

Ya. Dari dialog diskusi pada hari ini maka dengan ini kami bacakan kesimpulan rapat.

1. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya dimana tahun 2021 sebesar 995 miliar koma 74 dan per Mei 2022 telah mencapai 657,09 dari target yang 1,9 triliun atau sudah mencapai 34,56%. Selanjutnya, Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen dalam melakukan upaya-upaya akselerasi serta strategi yang matang dalam membuat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang kontrak kerja sama dan membuat Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur agar kedepan tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

Anggota? Kayaknya Anggota pada belum makan siang nih.

Pemerintah? Tolong pakai *mic*, Pak Sekjen karena kami langsung jadikan dokumen.

SEKJEN KKP RI:

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT:SETUJU)**

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

2. Komisi IV mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan ekspor komoditas ikan unggulan ke beberapa negara tujuan di tahun 2022 dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan. Selanjutnya, Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan peninjauan kesepakatan kerja sama atau diplomasi dengan negara tujuan ekspor agar biaya masuk produk hasil kelautan perikanan tidak dikenai tarif biaya.

Ini yang bikin konsep ini ada yang enggak benar ini, enggak mungkin enggak dikenai tarif biaya lah. Coba, mana mungkin tidak dikenai tarif biaya, pasti kena lah. Tidak terlalu tinggi, Perikanan tidak terlalu tinggi biaya, tinggi biaya tarif dan biayanya.

SEKJEN KKP RI:

Izin menyampaikan, Pak Ketua.

Untuk, kita memang upayakan 0% seperti Vietnam dengan Filipina sudah 0% untuk Eropa.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tapi enggak mungkin, Pak Sekjen karena kita ke Eropa saat ini masih 25-an, ke Spanyol kan coba cek. Kalau bilang 0% rasanya sulit, coba.

ESELON I KKP RI:

Baik, ya Pak.

Jadi mohon izin ini menjelaskan kalau untuk tarif bea masuk memang dimungkinkan menjadi 0, tetapi memang masih ada biaya-biaya lainnya Pak begitu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Nah, maka kan enggak mungkin kan. Sekarang Thailand ke Eropa masih kena 10% ya. Ya.

INTERUPSI:

Saya usul redaksional di dua kalimat terakhir itu. Dengan negara tujuan ekspor agar biaya masuk produk hasil kelautan perikanan tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu mahal.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya kan, prinsipnya tidak logic itu.

INTERUPSI:

Karena bea masuk itu kan sudah berarti tarif, jadi bea masuk atau tarif ya bea masuk/tarif produk hasil kelautan perikanan tidak terlalu tinggi, titik.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bea masuk.

INTERUPSI:

Tidak terlalu tinggi, titik di situ, tidak terlalu tinggi titik di situ ya. Hapus yang ke belakang ya agar bea masuk, bea masuk itu kan sudah tarif. Bea masuk produk hasil kelautan perikanan tidak terlalu tinggi, titik.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Anggota?
Pemerintah?

INTERUPSI:

Kalau diturunkan, Ketua?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Atau kita buat garis miring tidak terlalu tinggi garis miring diturunkan.

INTERUPSI:

Setuju, Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya, oke?

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT:SETUJU)**

3. Komisi IV mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan pendapatan pembudi daya ikan (Pokdakan) dari masyarakat melalui pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya dengan dukungan pasokan benih ikan dan calon indukan yang unggul berkualitas agar tingkat kematian, mortalitas dapat ditekan atau diminimalisir.

Pemerintah?

SEKJEN KKP RI:

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT:SETUJU)**

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ini tolong diperhatikan ini Dirjen Budidaya ini. Jangan tadi komandannya saja ditipu, apalagi anggotanya yang bukan langsung bisa memerintahkan.

4. Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyerahkan rincian terkait:
 - a. Data-data Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - b. Data penangkapan ikan terukur;
 - c. Data inventarisasi aset serta status yang terbukti tidak operasional (mangkak) terutama hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai bahan evaluasi perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya data diserahkan selambat-lambatnya ke Komisi IV sebelum Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan datang.

Anggota?

Pemerintah?

SEKJEN KKP RI:

Setuju.

**(KETOK PALU 1 KALI)
(RAPAT:SETUJU)**

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kita simpulkan draf rancangan ini menjadi kesimpulan.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sebelum kita menutup rapat dengar pendapat ini, kami persilakan Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan kata penutup dalam rapat dengar pendapat siang ini. Silakan.

SEKJEN KKP RI:

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Terima kasih atas saran dan masukannya dan kami akan upayakan yang sudah dituliskan sebagai risalah rapat akan kami laksanakan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah rapat dengar pendapat pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV, kami mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ada kekurangan kekhilafan dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, rapat dengar pendapat ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**(KETOK PALU 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.50 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. ACHMAD AGUS THOMY
NIP. 196508171988031002